

# PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL ABAD KE-21

---

Oleh:

**Bungaran Saragih**

Disampaikan dalam rangka Orasi pengukuhan sebagai Guru Besar Ekonomi Pertanian di Auditorium kompleks Rektorat Institut Pertanian Bogor, 21 Desember 1995.

---

## I. TESIS

Menjelang akhir Pelita IV yang lalu, suatu pemikiran tentang *agricultural-led development* dalam Pelita-V, bahkan Pelita-VI, telah diajukan (Saragih and Tampubolon, 1989). Suatu sumber pertumbuhan potensial yang diantisipasi adalah permintaan dalam negeri (secara khusus konsumsi masyarakat). Dari sudut teori, faktor ini (konsumsi masyarakat) tidak lajim menjadi faktor kebijakan (*policy variable*). Tetapi, bila ditempuh kebijakan memperbaiki produktivitas (yang pada gilirannya tercermin dari perbaikan tingkat upah) dan kebijakan memprioritaskan pasar dalam negeri lainnya (*demand approach*), maka pada dasarnya kita berupaya meningkatkan konsumsi masyarakat (bandingkan dengan White, 1990).

Melanjutkan pemikiran tersebut dan dengan mengikuti prakiraan beberapa indikator makro, maka pembangunan ekonomi nasional dalam abad ke-21 (paling tidak dalam beberapa dekade awal) akan masih tetap berbasis pertanian secara luas. Namun, sejalan dengan perkembangan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi, kegiatan jasa-jasa dan bisnis yang berbasis pertanian juga akan semakin meningkat; yaitu kegiatan agribisnis. Oleh sebab itu, pengembangan agribisnis (ter-

masuk agroindustri) akan menjadi salah satu kegiatan unggulan (*a leading sector*) pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas. Dalam abad ke-21, kita sangat memerlukan lebih banyak pendekatan yang "tidak anti pertumbuhan" sekaligus mampu mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, bersahabat dengan lingkungan, serta mampu meredam berbagai dampak globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang kurang menguntungkan. Dalam kaitan ini, mengembangkan agribisnis kecil dan memperkuat koperasi sekunder menjadi sangat strategis.

## II. DUA PERSOALAN (ISSUES) KRITIS

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional abad ke-21, beberapa persoalan (*issues*) perlu diantisipasi. Beberapa persoalan tersebut terpaut erat dengan dua *issues* pokok yang sifatnya kritis atau sentral yang menyangkut pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

*Pertama*, selama 25 tahun PJP I (1969-1994), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 6,8 persen per tahun. Pendapatan per kapita meningkat dari US\$70 pada tahun 1969 menjadi sekitar US\$700 pada akhir PJP-I. Selama PJP-II ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai rata-rata 7 persen per tahun, lebih tinggi dari yang dicapai pada PJP-I. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang diharapkan bisa ditekan dari 1,9 persen pertahun pada awal PJP-II menjadi 1,0 persen pertahun pada akhir PJP-II, pendapatan perkapita akan mencapai sekitar US\$2600 pada akhir PJP-II menurut harga pada tahun 1989/1990. Secara nominal, pendapatan per kapita tentu lebih tinggi lagi. Selama Repelita-VI, pertumbuhan ekonomi diupayakan untuk mencapai rata-rata 6,2 persen per tahun yang kemudian direvisi menjadi 7,0. Sasaran pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan sasaran

rata-rata pertumbuhan ekonomi selama PJP-II. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi sejak Repelita-VII harus bisa melampaui 7 persen per tahun.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama PJP-II ini, sumberdaya ekonomi perlu berkembang dengan cepat. Perkembangan ini perlu pula didukung oleh perubahan struktur lapangan kerja yang makin seimbang dan produktif. Dalam pandangan teori ekonomi neo-klasik (modal dan tenaga kerja adalah sumberdaya ekonomi utama) hal tersebut berarti harus ada akumulasi modal dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Menjadi pertanyaan, bagaimana itu bisa dicapai?

**Kedua**, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama PJP-I telah dimungkinkan oleh tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (melebihi 10 % per tahun) pada sektor-sektor non-pertanian secara khusus industri pengolahan dan jasa-jasa (perdagangan, keuangan dan perbankan, konstruksi, dan sebagainya). Tingkat pertumbuhan pada sektor pertanian (termasuk perhutanan) dan pertambangan hanya sekitar 3 sampai 4 persen per tahun. Dengan perkembangan itu, memang telah tercapai struktur perekonomian yang semakin seimbang. Sumbangan sektor pertanian dalam PDB telah turun menjadi 18,46 persen pada akhir PJP-I sedangkan sumbangan sektor industri meningkat menjadi 22,33 persen.

Namun dibalik keberhasilan itu terselubung pula hal yang memprihatinkan. Pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian selama PJP-I, walaupun sudah sangat kecil namun tetap positif. Pada akhir PJP-I (1993), penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas dan bekerja di sektor pertanian adalah 50,60 persen (atau 40,07 juta); industri, 15,63 persen; jasa-jasa, 33,54 persen; dan sisanya ditampung di sektor lain-lain. Dengan laju pertumbuhan output yang relatif rendah

dibandingkan dengan sektor non-pertanian (industri dan jasa-jasa) maka bagian yang diterima oleh tenaga kerja sektor pertanian dari kenaikan nilai tambah juga relatif sangat kecil. Dengan perkataan lain, selama PJP-I telah terjadi perubahan struktural yang tidak seimbang (*imbalanced structural transformation*). Kesenjangan yang terjadi lebih buruk lagi sebab dalam sektor industri itu sendiri, misalnya, terjadi pula kesenjangan antara golongan pekerja (buruh dan non-buruh). Sekitar 27 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin tentunya sebagian besar termasuk dalam kelompok tenaga kerja (pertanian dan non-pertanian) beserta keluarganya.

Dari persoalan kedua ini, tersirat lemahnya penciptaan lapangan kerja baru selama PJP-I. Pertanyaannya adalah apakah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0 hingga 7,5 persen per tahun selama PJP-II akan terjamin perluasan kesempatan kerja yang sekaligus bisa menekan kesenjangan serta menghapus kemiskinan di tanah air? Negara-negara yang tergolong dalam *the East Asian Miracles* (Jepang, Korea Selatan, Taiwan), Singapura dan Hongkong, serta Malaysia, Thailand dan Cina, telah berhasil dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (antara 9 sampai 13 persen per tahun) dalam dekade-dekade terakhir. Apakah dengan tingkat pertumbuhan seperti itulah baru tersedia lapangan kerja bagi hampir semua orang? Jika begitu, bagaimana kita mencapainya? Jalur-jalur pertumbuhan mana yang perlu kita tempuh?

### III. JALUR-JALUR PILIHAN

Menjelang berakhirnya PJP-I dan dalam rangka persiapan perencanaan pembangunan selama PJP-II, berbagai pihak telah mencoba mengantisipasi berbagai sasaran pertumbuhan ekonomi selama era industrialisasi (PJP-II). Masing-masing mencoba mengkaji dan melontarkan ide-ide bagaimana kita bisa menggali sumber-sumber untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi (termasuk bagaimana membiayainya, kelembagaannya, kebijakan-kebijakannya, dan lain-lain). Dari sekian banyak pemikiran yang telah dilontarkan, secara umum, terdapat **tiga jalur pilihan** industrialisasi yang memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanpa hendak memperdebatkan secara rinci keunggulan masing-masing, apalagi "falsafah dasarnya", jalur pilihan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

*Jalur Pertama*, mengandalkan pada industri yang berbasis luas (*broad-based industry*) yang (tentunya) mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dengan kebijaksanaan dan strategi ini, terbuka kesempatan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat *foot-loose industry*; yakni industri yang tidak lagi diminati negara penemunya atau negara pengguna lain karena nilai tambah yang diciptakan tidak mampu membayar ongkos produksi yang kompetitif (terutama upah) di negara tersebut. Namun dalam prakteknya, negara penemu teknologinya masih tetap berusaha mendapatkan *economic rent* dari temuan teknologi tersebut. Paling-paling negara baru pengguna hanya menguasai teknologi perakitannya saja.

---

<sup>1</sup>Baru-baru ini, **dua** aliran pembangunan yang berkembang di negara kita menjadi bahan pembicaraan pakar, pengamat, dan pelaku bisnis; yakni aliran yang bersumber pada pemikiran Prof. Widjojo Nitisastro (*Widjojonomics*) dan yang bersumber pada pemikiran Prof. B.J. Habibie (*Habibienomics*). Lihat Harian Kompas, Jakarta, Jumat 3 November 1995 (Halaman 1).

Dapat dikatakan bahwa pemikiran ini mengakar pada rencana pembangunan yang telah dibuat oleh Prof. Widjojo Nitisatro (dan kawan-kawan) menjelang atau pada awal-awal PJP-I. Hal itu terbukti dari rencana pembangunan ekonomi nasional yang diwarnai oleh tahap-tahap pembangunan mengikuti pola pemikiran Rostow (Rostow, 1960) dari sejak PJP-I hingga PJP-II ini.

***Jalur Kedua***, mungkin karena kelemahan yang dianggap cukup mendasar, yakni ketergantungan terhadap teknologi yang masih dikuasai oleh negara penemunya maka muncul pemikiran baru. Pemikiran baru tersebut ialah mencoba mengandalkan industri atau kegiatan-kegiatan strategis yang memanfaatkan teknologi canggih dan rumit (*hi-tech industry*) serta bernilai-tambah tinggi dengan perkiraan kuat bahwa apabila kita mampu menguasai teknologi canggih dan rumit tersebut maka akan lebih mudah menguasai teknologi pada jenjang lebih bawah (*intermediate and low-tech industry*). Aliran pemikiran ini bersumber dari pemikiran Prof. B.J. Habibie.

Dengan pemikiran seperti ini, upaya dan investasi untuk membangun industri ("strategis") seperti Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Bio-technology, pemanfaatan satelit komunikasi, dan lain-lain mendapat pembenaran. Sebelum itu, teknologi canggih, rumit dan bernilai-tambah tinggi yang dimanfaatkan baru terbatas dalam bidang eksplorasi dan penambangan minyak dan gas bumi. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah "jalan pintas" ini benar-benar menyingkat waktu untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi yang sangat didambakan oleh perekonomian kita.

***Jalur Ketiga***. Dengan dua jalur terdahulu, belum ada jaminan bahwa industrialisasi (dalam PJP-II) akan didukung oleh pertanian (dan pedesaan) yang tangguh seperti yang dituntut dalam beberapa GBHN

(sampai GBHN 1993). Industrialisasi tanpa membenahi sektor pertanian (dan pedesaan) terlebih dahulu, atau transformasi ekonomi yang tidak seimbang, pada gilirannya akan menyebabkan sektor pertanian dan pedesaan itu menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan ekonomi bisa tersendat atau, walaupun pertumbuhan bisa dipacu lebih tinggi, kesenjangan akan semakin melebar serta menimbulkan dampak negatif lain yang cukup serius.

Oleh sebab itu, setidaknya pada tahap-tahap awal, industrialisasi perlu pula mengandalkan industri atau kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan atau menciptakan nilai tambah baru bagi produk-produk pertanian primer serta industri atau kegiatan lain yang memproduksi bahan-bahan dan alat-alat untuk meningkatkan produktivitas pertanian (*agro-industry*). Jalur ini juga mempunyai berbagai keunggulan. Apabila berbagai **syarat tertentu** bisa dipenuhi, maka pendekatan ini benar-benar merakyat dan berkeadilan, tidak anti pertumbuhan dan bersahabat dengan lingkungan. Seperti berulang kali diucapkan oleh Bapak Presiden Soeharto, pembangunan agroindustri adalah jembatan menuju industrialisasi.<sup>2</sup>

Fokus pembahasan dan diskusi dalam makalah ini adalah jalur ketiga, pembangunan agribisnis dan agroindustri tanpa memperbandingkan dengan dua jalur lainnya. Hal ini akan dibahas pada bagian V. Sebelumnya pada bagian IV dibahas secara singkat tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada bagian VI disajikan strategi dan pendekatan.

---

<sup>2</sup>Pada awalnya dinyatakan dalam pidato beliau dalam rangka Dies Natalis ke XXX Institut Pertanian Bogor, September 1993. Hal itu kemudian diulangi lagi dalam beberapa temu wicara.

#### **IV. TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN EKONOMI**

Negara kita baru saja memasuki era pembangunan tahap ke-II (PJP-II), atau era industrialisasi yang secara formal meliputi periode 1994-2018. Gambaran pentahapan ekonomi selama periode itu, apalagi pada pasca PJP-II, masih belum begitu jelas. Selama masa orde baru, perencanaan dan pentahapan pembangunan ekonomi (berikut kebijaksanaan), pada awalnya banyak diwarnai oleh karya Rostow dan kawan-kawan (Rostow, 1960), Harrod-Domar, dan lain-lain. Pemikiran Rostow dkk banyak didasari pada perkembangan di negara-negara maju di Eropah, Amerika Serikat dan, barangkali, Australia; bermula dari revolusi industri di Eropah. Sejak awal tahun 1960-an, pola pentahapan tersebut nampaknya diikuti pula di beberapa negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Negara-negara tersebut telah berhasil membangun industrinya hampir tanpa friksi sosial, ekonomi dan politik. Bank Dunia menyebut Negara-negara tersebut sebagai *The East Asian Miracle* (World Bank, 1993). Belakangan, Malaysia juga sedang dalam mengadopsi pola perkembangan tersebut.

Yang menarik untuk diperhatikan dalam kaitan ini ialah bahwa, menjelang tahapan lepas landas (industrialisasi), negara-negara tersebut telah terlebih dahulu mempersiapkan sumberdaya manusianya, prasarana dan fasilitas, disertai pertanian dan pedesaan yang tangguh (lihat Rostow, 1960). Sejumlah negara-negara Asia, Amerika Tengah dan Latin telah juga mencoba membangun industri tetapi ternyata kurang berhasil karena kurang mempersiapkan faktor-faktor pokok tersebut. Berbagai goncangan sosial, ekonomi dan politik yang kurang menggembirakan atau mendukung mewarnai kegiatan pembangunan selanjutnya seperti halnya Pakistan, India, Pilipina, Meksiko, serta sejumlah negara di Amerika Latin. Belakangan ini, Chile mulai membangun perekonomiannya berawal dari pembangunan pertanian dan



agribisnis serta telah mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan; bahkan yang terbaik keragaannya di Amerika Latin.

Beberapa faktor menentukan keragaan industrialisasi di negara-negara dunia. Berdasarkan beberapa pengamat, faktor kestabilan sosial-politik memang diperlukan tetapi tidak memadai. Harus ada kebijaksanaan ekonomi yang tepat yang mampu meredam guncangan-guncangan atau friksi sosial-politik tersebut. Jepang telah menerapkan kebijaksanaan ekonomi *cheap goods on the roads* didukung dengan kebijaksanaan *Exchange Rates and State-Led Capitalism* (Yotopoulos, 1990). Hampir selama dua dekade, Jepang tidak pernah mengubah nilai-tukar mata uangnya terhadap berbagai mata uang asing. Menurut pengamat lain, Jepang dan beberapa negara yang tergolong dalam *the East Asian Miracle* (Korea Selatan dan Taiwan) telah menerapkan pendekatan *unimodal*, ketimbang pendekatan *polymodal* (James et al., 1987), atau penekanan pembenahan pada sisi permintaan (*demand*) ketimbang pada sisi penawaran atau peningkatan produksi (*supply*) sesuai dengan pengamatan Benjamin White (White, 1990). Tidak bertentangan dengan *demand approach* di muka, Saragih dan Tampubolon (1989) mengajukan pemikiran kemungkinan *agricultural-led development strategy* dalam Pelita-V, bahkan dalam Repelita-VI.

Apapun atribut yang diberikan oleh berbagai pengamat tersebut, pada dasarnya mereka menunjuk pada tiga hal yang satu sama lain terkait erat yaitu:

- Penekanan pada potensi pasar dalam negeri dengan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar; lebih dari 190 juta, melebihi penduduk Jepang pada awal industrialisasinya.
- Peningkatan daya beli sebagian besar masyarakat (buruh, petani dan yang tergolong miskin lainnya) melalui peningkatan produktivitas dalam bentuk upah yang diterima, perluasan kesempatan kerja dengan tingkat upah yang

lebih baik, perbaiki nilai-tukar (*terms of trade*) petani. Hal ini terkait dengan upaya memproduksi barang dan jasa yang terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat kita masih terlibat dalam sektor pertanian dan pedesaan.

- Menekankan pembangunan industri yang terkait erat (dalam pengertian *backward and forward linkages*) dengan sektor pertanian dan pedesaan, terutama pada tahap awal industrialisasi; sebagai salah satu strategi industrialisasi pertanian (*industrialised agriculture*).<sup>3</sup>

Dari segi alokasi tenaga kerja dari berbagai lapisan keahlian (sumberdaya manusia) yang juga mencerminkan produktivitas, perkembangan ekonomi akan mengikuti tahap-tahap seperti pada Bagan 1 (menurut Crawford, 1991). Tahap perkembangan ekonomi seperti pada Bagan 1 ini juga perlu menjadi acuan dalam mengantisipasi dan memprogramkan pengembangan sumberdaya manusia. Proses industrialisasi yang ditempuh sebaiknya mengikuti pola sumberdaya yang kita miliki seperti diingatkan oleh Menko Eku Wasbang Prof. Saleh Afiff.<sup>4</sup> Proses industrialisasi dengan sumberdaya yang terlalu dipaksakan dan pasar yang tidak mampu menyerap di beberapa negara pada gilirannya akan berhenti di tengah jalan.

Dari sudut pangsa sektoral, struktur perekonomian kita memang sudah semakin seimbang seperti telah kita ketahui semuanya. Namun, dengan mengacu pada Bagan 1 dan jumlah penduduk yang bekerja pada masing-masing sektor, maka tahap perekonomian kita berada dalam peralihan dari tahap awal ke tahap perkembangan dalam suatu ekonomi industri.

---

<sup>3</sup>Dr. Pantjar Simatupang, dalam orasi pengukuhan sebagai Peneliti Utama, telah mencoba mensintesis secara lebih serius dan operasional pengertian industrialisasi pertanian (*industrialised agriculture*) ini (Simatupang, 1995).

<sup>4</sup>Harian Kompas, Jakarta, Jumat 9 September 1994; halaman 3 kolom 6-9.

**Bagan 1.**  
**Tahap-Tahap Perkembangan Ekonomi Dikaitkan dengan Produktivitas Tenaga Kerja**

Ekonomi Pertanian/ Pra-indus- tri	Ekonomi Industri			Ekonomi Informasi		
	Tahap awal	Tahap berkembang	Tahap matang	Tahap awal	Tahap berkembang	Tahap matang
Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian
		Rumahtangga kerajinan			Industri Pengolahan	Industri Pengolahan
	Rumahtangga kerajinan	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan		Keluarga	Keluarga
	Industri Pengolahan		Keluarga	Keluarga		Jasa
	Keluarga	Keluarga	Jasa	Angkutan	Angkutan	Angkutan
Rumahtangga kerajinan		Jasa	Angkutan	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi
	Jasa	Angkutan	Konstruksi	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan
		Konstruksi	Perdagangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan
		Perdagangan	Keuangan	<i>Real estate</i>	<i>Real estate</i>	<i>Real estate</i>
Jasa		Keuangan, dll	<i>Real estate</i>	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
		<i>Real estate</i>	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan
				<i>Business leisure</i>	<i>Business leisure</i>	<i>Business leisure</i>

Sumber: Diadopsi dari Crawford, 1991

## V. AGRIBISNIS/AGROINDUSTRI SEBAGAI SUATU SEKTOR UNGGULAN

Peranan penting atau keunggulan agribisnis tidak bisa lepas dari agroindustri sebab agribisnis (*agri-business*) diartikan sebagai: "... *the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies, production activities on the farm, and storage, processing and distribution of farm commodities and items made from them...*;" seperti pertama kali diperkenalkan oleh almarhum DR. J.J. Drilon (dari Filipina) dalam lingkup Asia Tenggara. Dengan konsep seperti inilah maka agribisnis sebagai suatu sistem dapat diterima oleh semua pihak.<sup>5</sup> Dengan konsep ini, konsep **agribisnis jelas merupakan cara baru melihat sektor pertanian**. Selama pra dan masa PJP-I dapat dikatakan bahwa kita melihat pertanian secara sangat sempit; semata-mata hanya melihat sub-sistem produksi atau usahataniannya saja. Cara pandang yang lama ini telah berimplikasi yang kurang menguntungkan bagi pembangunan pertanian (dan pedesaan) yakni: **pertanian dan pedesaan hanya sebagai sumber produksi primer yang berasal dari tumbuhan dan hewan tanpa menyadari potensi bisnis yang sangat besar yang berbasis (derived) produk-produk primer tersebut.**

Keunggulan atau peranan strategis agribisnis dan agroindustri dapat kita ikuti dalam data dan statistik, bukti empirik maupun dari sudut pandang teoretik. Pengkajian seperti ini sangat diperlukan dalam rangka memasyarakatkan berbagai paradigma yang menjadi titik tolak pengembangan berbagai kebijaksanaan dasar, landasan operasional dan kiat-kiat mengembangkan agribisnis dan agroindustri.

---

<sup>5</sup>Perlu dicatat bahwa, di negara kita, agroindustri lebih menekankan kegiatan hilir sektor pertanian sedangkan industri hulunya termasuk dalam industri kimia (pupuk, pestisida dan insektisida), dan industri otomotif (traktor, mesin-mesin pertanian, dan lain-lain).

### **5.1. Penelusuran Data/Statistik**

Tidak begitu mudah menunjukkan peranan atau sumbangan agribisnis dan agroindustri terhadap output nasional karena berbagai hal yang sulit dirinci satu persatu dalam kesempatan ini. Sampai sejauh ini, kita baru mampu memanfaatkan data atau statistik perdagangan luar negeri atau ekspor dan import.

Selama periode 1981-1995, sumbangan atau pangsa relatif nilai ekspor produk agroindustri terhadap nilai ekspor non-migas (yang mengalami turun naik) berkisar antara 28 sampai 43 persen. Selama periode tersebut, pangsa relatif nilai ekspor produk agroindustri berkisar antara yang terendah 6,4 persen pada tahun 1981 dan yang tertinggi pada tahun 1995 yang mencapai 29,6 persen. Di luar itu, pangsa relatif tersebut berkisar antara 11 sampai 24,5 persen. Laju pertumbuhan nilai ekspor agroindustri selama periode tersebut rata-rata 17,7 persen per tahun.

Data dan statistik di atas belum seluruhnya mengungkapkan peranan agribisnis (*understated*) karena dua hal yaitu: (i) nilai tambah yang diciptakan melalui penyediaan jasa-jasa yang melayani kegiatan agroindustri (transportasi, pergudangan, keuangan, dan lain-lain) belum terdaftar, serta (ii) industri hulu yang sangat penting dari suatu sistem agribisnis juga tidak dimasukkan seperti industri kimia, industri perakitan traktor, mesin-mesin dan alat-alat pertanian. Hal ini dapat ditunjukkan dalam diskusi selanjutnya.

Oleh sebab itu nampak pula bahwa nilai ekspor produk industri di luar agroindustri selama periode 1981-1995 tersebut memang cukup jauh mengungguli nilai ekspor agroindustri. Laju pertumbuhan mencapai rata-rata 21,2 persen per tahun. Sumbangannya terhadap nilai ekspor

non-migas mencapai 50 persen lebih, dan terhadap nilai ekspor total mencapai 30 persen lebih.

Namun, akhir-akhir ini, perkembangan ekspor non-migas kita patut diperhatikan terutama dalam situasi ekspor migas yang cenderung terus menurun akibat rendahnya harga minyak bumi di pasar internasional. Keprihatinan ini, secara khusus, muncul dari situasi industri tekstil yang selama ini menjadi andalan ekspor non-migas sebagai akibat adanya pesaing-pesaing baru. Itu jugalah sebabnya kita mencoba melihat upaya mengatasi masalah tersebut melalui jalur agro-industri. Namun sasarannya jauh lebih luas dari sekedar menjawab masalah kerawanan ekspor tersebut.

## **5.2. Pembeneran Empirik dan Teoretik**

Dari hasil analisis empirik, keunggulan agribisnis/agroindustri tersebut cukup jelas seperti dapat diikuti pada Tabel 1 (Dasril, 1993); yang diturunkan dari Tabel Input-Output Indonesia 1971, 1975, 1980, 1985 dan 1990. Keadaan tahun 1995 adalah hasil estimasi.

Yang pertama terlihat adalah peranan penting agroindustri (dalam bentuk sumbangan atau pangsa relatif terhadap Nilai Tambah industri non-migas dan ekspor industri non-migas) yang cukup tinggi. Penting pula diperhatikan bahwa pangsa import agroindustri relatif rendah, rata-rata sekitar 27 persen. Artinya, dari segi import ini, agroindustri kurang membebani neraca perdagangan dan pembayaran luar negeri. Peranannya dalam penyediaan lapangan kerja industri non-migas juga bisa diandalkan, rata-rata berkisar antara 63 sampai 68 persen. Angka pengganda (*multiplier*) terhadap nilai tambah terus mengalami kenaikan dari 0,87 pada tahun 1971 menjadi 2,31 pada tahun 1985, dan mencapai 2,72 pada tahun 1990 serta diperkirakan mencapai 3,23 pada tahun 1995. Angka pengganda ini cukup tinggi sehingga bisa diandal-

kan sebagai sumber pertumbuhan melalui keterkaitan ke belakang dan ke depan (*backward and forward linkages*), serta ke samping.

**Tabel 1.**  
**Beberapa Ciri Keunggulan Penting Agroindustri di Indonesia, 1970-1990**

Uraian	1971	1975	1980	1985	1990	1995
Pangsa Terhadap Nilai industri Non-Migas (%)	62.7	64.3	65.5	66.6	62.13	68.70
Pangsa Terhadap Ekspor Industri Non-Migas (%)	79.2	45.5	47.4	75.4	80.74	80.74
Pangsa Terhadap Impor Industri Non-Migas (%)	26.4	26.3	28.2	28.6	32.12	31.63
Pangsa Terhadap Kesempatan Kerja Non-Migas (%)	75.6	63.1	70.7	79.4	75.04	74.95
Multiplier Nilai Tambah	0.87	0.83	2.24	2.31	2.91	3.23
Multiplier Kesempatan Kerja	6.87	2.98	0.35	0.57	0.39	0.35
Sumber Pertumbuhan Utama	KS	KS	KS	KS	KS	KS

Sumber: 1. Tahun 1971-1985: Dasril, 1993.

2. Tahun 1990-1995; Hasil perhitungan PSP IPB, Th. 1995 adalah estimasi KS=konsumsi swasta (*private consumption*).

Angka penganda kesempatan kerja terus mengalami penurunan. Dengan laju pertumbuhan output yang positif dan cukup tinggi, penurunan tersebut menunjukkan peningkatan nyata dari produktivitas tenaga kerja. Dapat juga dikatakan bahwa agroindustri semakin beralih ke penggunaan teknologi lebih canggih yang hemat tenaga kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan perkataan lain, modernisasi per-

tanian dan pedesaan akan dimulai dari pengembangan agroindustri ini.<sup>6</sup>

Sumber pertumbuhan utama agroindustri adalah konsumsi masyarakat (*private consumption*). Artinya, perkembangan agroindustri selama ini relatif kurang memberatkan bagi anggaran pemerintah disamping turut memacu pembentukan modal. Pengembangan agroindustri (agribisnis dalam arti yang lebih luas) tidak bertentangan dengan ajas kemandirian ekonomi yang diharapkan, bahkan mendukung. Arti penting lain dari gambaran ini adalah bahwa pasar produk agroindustri lebih banyak mengandalkan pasar dalam negeri.

Walaupun begitu, peranan penting agribisnis/agroindustri ini serta perkembangannya di masa depan perlu diwaspadai sebab, dalam kenyataan, penyumbang terbesar ekspor agroindustri adalah produk olahan kayu yang masih bersifat ekstraktif, karena hutan tanaman industri (HTI) kita belum berproduksi. Eksploitasi yang tidak terkendali bisa mengganggu kelestarian system penyangga kehidupan dan fungsi lingkungan hidup dari hutan. Sudah terasa tekanan dunia luar agar lebih menekankan produksi dengan proses yang bersahabat dengan lingkungan (seperti *eco-labelling*).

Agribisnis dalam pengertian di muka menunjukkan adanya keterkaitan vertikal antar sub-sistem agribisnis serta keterkaitan horizontal dengan sistem atau sub-sistem lain di luar seperti jasa-jasa (finansial dan

---

<sup>6</sup>Dr. Arthur T. Mosher, dalam dua karyanya yang membicarakan pertanian modern atau *modern agriculture* (Mosher, 1969 dan Mosher, 1973), tidak menyinggung tentang agribisnis dan agroindustri ini. Dengan begitu, diskusi tentang sektor hilir pertanian menjadi agak terbatas.



perbankan, transportasi, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain).<sup>7</sup> Keterkaitan luas ini (*industrial linkages*) sudah disadari sejak dahulu oleh para ekonom pasca revolusi industri sehingga mereka menekankan arti strategis dari menempatkan pertanian (dan pedesaan) sebagai *core business* pada tahap pembangunan sebelum lepas landas (lihat Rostow, 1960; atau hasil karya pemenang hadiah Nobel Arthur Lewis) terutama dalam kaitannya dengan proses industrialisasi. Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik dari Solow (Solow, 1953) pada dasarnya mengasumsikan adanya keterkaitan tersebut. Pemikiran keterkaitan inilah yang melandasi pendekatan *unimodal* seperti pernah dianjurkan (James *et al.*, 1987, Saragih & Tampubolon, 1989). Namun nampaknya ada faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam menerapkan pendekatan *unimodal* tersebut bagi beberapa negara yang gagal membangun industrinya.

Tidak perlu diragukan bahwa pembangunan ekonomi yang agribisnis dan agroindustri sebagai salah satu andalan pada menjelang lepas landas atau masa-masa awal lepas landas tidak akan bisa mencapai laju pertumbuhan yang cukup tinggi; antara 7 sampai 10 persen lebih per tahun. Pengalaman Thailand, Malaysia dan Chile dalam dekade terakhir (Tabel 2) dan negara-negara *The East Asian Miracle* di masa lalu merupakan bukti yang nyata. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut bisa dicapai sepanjang persyaratan-persyaratan yang dikemukakan pada halaman 7 dapat dilaksanakan; di samping perlunya dukungan serius dari pemerintah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Dengan pengertian ini, kita lebih mampu melihat pertanian dengan wawasan yang lebih luas termasuk posisinya dalam konteks makro-ekonomi (nasional dan internasional) serta bagaimana implikasi-implikasi kebijakan makro terhadap pertanian (dan pedesaan). Pada pengertian ini pula terletak **kekuatan** konsep agribisnis sebagai suatu cara baru melihat sektor pertanian dan pedesaan.

<sup>8</sup>Lihat juga pengalaman Thailand tentang peranan pemerintah dalam reportase Harian Kompas, Kamis 30 Nopember 1995 (halaman 2).

Tabel 2.  
Beberapa Indikator Makro Negara-Negara Anggota APEC

Negara	Pendapatan per kapita (US\$, 1994)	Pertumbuhan riil GDP (%/tahun)			Inflasi (% , 1994)
		1994	1995 <sup>**</sup>	1996 <sup>**</sup>	
Kanada	18900	4.3	2.3	2.5	2.5
Amerika Serikat	25900	4.1	2.8	2.3	2.6
Cile	3160 <sup>*)</sup>	4.2	7.5	6.5	7.2
Meksiko	4195	3.5	5.0	3.0	41.7
Cina	435	11.8	10.2	9.5	13.2
Hongkong	21558	5.4	5.0	-	8.3
Jepang	38750	0.6	2.8	-	-0.2
Korea Selatan	8550	8.4	9.0	7.0	4.7
Taiwan	11236	6.5	6.6	6.8	2.0
Brunei Darussalam	18500	1.8	2.0	2.5	2.5
Indonesia	780	7.3	7.8	7.5	9.0
Malaysia	3530	9.2	8.5	-	3.4
Filipina	1010	4.3	5.8	7.0	11.8
Singapura	22520	10.1	7.5	-	1.5
Thailand	2315	8.5	8.6	8.7	6.2
Australia	17500	4.1	4.8	3.7	4.5
Selandia Baru	14500	6.2	3.5	3.5	3.5
Papua Niugini	1249	0.8	-	-	6.1
<b>APEC</b>	-	3.5	3.1	3.0	-

Sumber: Berbagai sumber seperti yang dikutip oleh Harian Kompas, tanggal 17-18 Nopember 1995.

\*) untuk tahun 1993

\*\*) perkiraan.

Yang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar adalah apakah rantai kegiatan tersebut seluruhnya berlangsung secara lokal atau dalam negeri? Kenyataan tidak selalu demikian. Bisa saja agroindustri dalam negeri (pada hilir) masih atau harus mengandalkan produk pertanian atau bahan mentah yang diimport seperti tekstil, susu bubuk, kue kalengan, mie *instant*, dan banyak lagi. Demikian juga halnya dengan kegiatan di hulu. Berbagai bahan untuk pembuatan pupuk kimia, insektisida dan pestisida, suku cadang traktor dan mesin pertanian lain, serta alat-alat pertanian juga harus diimport. Hal ini disebabkan karena, dengan berbagai perkembangan internasional yang mempengaruhi keunggulan komparatif dan kompetitif, jenis-jenis industri tersebut sangat bisa bersifat *foot-loose industry*. Keadaan atau industri seperti inilah sebenarnya yang perlu terus diwaspadai dan dihindari sebab, kalau sebagian besar kegiatan agribisnis dan agroindustri tersebut tidak berlangsung secara lokal dalam rangka substitusi import, maka nilai tambah yang diciptakan juga sebagian besar bocor ke luar. Yang sangat tidak menguntungkan adalah bahwa nilai tambah yang bisa ditahan di dalam negeri hanya sebagian kecil yang bisa dibayarkan kepada tenaga buruh lokal yang memang dinilai murah. Contoh yang nyata adalah industri tekstil, industri makanan yang berbahan mentah gandum, industri susu, dan banyak lagi yang lain.

## **VI. PENDEKATAN DAN STRATEGI**

### **6.1. Strategi Pokok**

#### **6.1.1. Pengembangan agribisnis berskala kecil**

Paling tidak selama masa transisi dalam PJP-II ini, kita perlu mengembangkan strategi dan kebijaksanaan yang menempatkan agroindustri (dan agribisnis) sebagai salah satu sektor unggulan. Sumber-sumber pertumbuhan yang cukup potensial perlu dimanfaatkan untuk memacu,

tingkat pertumbuhan sesuai dengan sasaran pembangunan ekonomi pada PJP-II ini, bahkan, kalau bisa melampaui sasaran-sasaran tersebut. Peningkatan pertumbuhan sekaligus juga memperbaiki berbagai kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan antar golongan dan antar daerah apabila sasarnya adalah sebagian besar penduduk berpendapatan rendah atau miskin yang terutama terkonsentrasi di sektor pertanian dan pedesaan. Pertumbuhan ekonomi, di satu pihak, dan pertumbuhan *employment* (kesempatan kerja) di sektor pertanian dan pedesaan yang menyerap sebagian besar angkatan kerja, di lain pihak, bisa saja sebagai dua sisi mata uang yang sama. Perbaikan kesejahteraan itu sendiri sebagai upaya menekan kesenjangan merupakan sumber pertumbuhan yang cukup potensial. Itulah hakekat dari *demand approach*.

Sumber kemiskinan antara lain adalah adanya bias dalam kebijaksanaan (misalnya Jazairy *et al.*, 1992). Penduduk miskin (terutama petani kecil dan buruh tani) tidak mampu lagi mempertahankan produktivitas sumberdaya alam yang dikuasainya (terutama lahan). Sebagian mereka yang kurang mampu keluar dari kesulitannya lalu merambah hutan dan menimbulkan kerusakan pada sistem penyangga kehidupan atau merusak lingkungan. Pengembangan agribisnis dan agroindustri yang meningkatkan kesejahteraan penduduk berpendapatan rendah dan tergolong miskin turut membantu dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengurangi ketergantungan lahan.

Pengembangan usaha agribisnis berskala kecil sangat penting dan strategis ditinjau dari berbagai pemikiran di muka. Dewasa ini terdapat lebih dari 32 juta usaha kecil dengan volume usaha kurang dari Rp. 2 milyar rupiah per tahun; bahkan 90 persen diantaranya adalah usaha kecil-kecil dengan volume usaha kurang dari Rp 50 juta rupiah per tahun. Selanjutnya dari yang 90 persen tersebut, 21,30 juta unit usaha

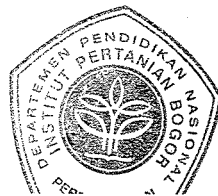
lebih adalah usaha rumahtangga yang bergerak di sektor pertanian. Apabila disertakan dengan keluarganya, maka jumlah pengusaha kecil dengan anggota rumahtangganya bisa mencapai 80 persen dari penduduk Indonesia; suatu potensi pasar yang sangat besar.

Berbagai masalah dan kendala dihadapi oleh usaha kecil ini namun yang paling mendasar barangkali adalah lemahnya posisi-tawar mereka. Akibatnya mereka hanya bisa berusaha dalam keguroman (sub-sisten) dengan ruang pengambilan keputusan (*decision space*) yang sangat sempit.

Di masa depan, peranan agribisnis berskala kecil ini akan semakin penting dan memiliki keunggulan karena beberapa faktor (lihat Crawford, 1991; halaman 53) sebagai berikut:

- relatif tidak memerlukan terlalu banyak modal investasi terutama bagi yang bergerak di bidang jasa-jasa;
- usaha agribisnis kecil dapat bergerak luwes menyesuaikan diri dalam situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh persoalan-persoalan birokrasi seperti yang dihadapi oleh perusahaan besar;
- usaha agribisnis kecil memiliki tenaga-tenaga penjualan dan wirausaha yang tertempa secara alami yang tidak berminat (*vested-interest*) dalam sistem produksi yang sudah ada dan sudah mantap; dan,
- perubahan selera konsumen yang semakin bergeser dari produk-produk tahan lama yang dihasilkan secara massal ke produk-produk yang lebih manusiawi (*personalized goods*) yang lebih tepat untuk dilayani usaha-usaha kecil.

Dilihat dari sistem pelayanan, secara khusus dari lembaga finansial dan perbankan dewasa ini di negara kita, beberapa faktor keunggulan usaha agribisnis kecil bisa juga tidak tercapai antara lain misalnya karena kurangnya akses usaha kecil terhadap kredit komersial perbankan. Ini baru satu dari sekian banyak masalah dan kendala yang



dihadapi usaha kecil di tanah air. Masalah dan kendala lain yang tidak kalah penting adalah seperti pemasaran, alih teknologi, informasi dan sebagainya.

Kalau diperhatikan, maka adanya masalah dan kendala tersebut bermuara atau bersumber pada lemahnya posisi-tawar (*bargaining position*) dari usaha kecil. Lemahnya posisi-tawar ini bisa terjadi karena: (i) usaha kecil yang terlalu kecil sehingga tidak memiliki atau tidak mampu menyimpan *energy* yang cukup untuk bergerak secara leluasa, lincah dan dengan stamina yang cukup dalam alam bisnisnya, serta (ii) kurang terorganisirnya gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan usaha kecil tersebut.

Yang pertama menyangkut skala usaha minimal yang menyebabkan usaha kecil tersebut mampu melakukan akumulasi modal. Modal yang diakumulasi tersebut tentunya adalah sebagian dari nilai tambah (dalam porsi yang rasional atau optimal) yang diciptakan oleh usaha kecil tersebut. Jika begitu, maka skala usaha dari usaha-usaha kecil yang ada dewasa ini perlu ditingkatkan.

Di Amerika Serikat, batasan usaha kecil tersebut adalah aset kurang dari US \$ 10 juta (atau sekitar Rp. 20 milyar) dengan pekerja kurang dari 500 orang (Crawford, 1991). Dengan batasan tersebut, jumlah usaha kecil yang terdapat di negara tersebut pada tahun 1989 adalah 19 juta unit; yang telah meningkat sebesar 50 persen dibandingkan dengan tahun 1980. Usaha-usaha kecil tersebut mempekerjakan 60 persen dari angkatan kerja di negara tersebut dengan sumbangannya terhadap GNP adalah sekitar 50 persen. Volume usaha dari usaha kecil Amerika Serikat ini sama besarnya dengan seluruh perekonomian Jepang (*ibid*).

Dengan diskusi di muka maka makna strategis (*the significance*) pengembangan agribisnis dan agroindustri berskala kecil dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Apabila posisi-tawar usaha agribisnis kecil bisa diperbaiki maka pengembangan agribisnis/agroindustri bisa pula menjadi jalur pendemokrasian ekonomi. Di Indonesia, 21,30 juta usaha rumahtangga di sektor pertanian membentuk hampir seluruh angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian dengan nilai output primernya saja mencapai sekitar 15 persen dari PDB.
- Dalam lingkungan ekonomi yang demokratis, kebocoran ekonomi (*economic loss*) sangat minimal dibandingkan struktur ekonomi yang monopolistis oleh usaha yang besar-besar. Oleh sebab itu, pengembangan agribisnis berskala kecil "tidak anti pertumbuhan". Bahkan, dengan perbaikan pendapatan 21,30 juta usaha rumahtangga pertanian melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri serta sepanjang nilai-tukar petani tidak semakin memburuk, maka laju pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih tinggi lagi melalui peningkatan potensi pasar dalam negeri.
- Pengembangan agribisnis dan agroindustri berskala kecil relatif mudah untuk diarahkan bersahabat dengan lingkungan.

#### **6.1.2. Koperasi agribisnis**

Faktor kedua yang memperlemah posisi-tawar usaha kecil adalah lemahnya kerjasama di antara mereka untuk menghimpun *energy* bersama untuk kekuatan mereka sendiri. Di satu pihak, apabila kita hendak mengembangkan agribisnis kecil maka itu jelas berbasis pertanian dan pedesaan. Selama ini, satu-satunya wadah organisasi formal yang menggalang dan menghimpun *energy* untuk kekuatan di bidang ekonomi (dan sosial) di pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Secara administratif, paling tinggi, wilayah kerja dan lingkup bisnis KUD adalah kecamatan.

Di pihak lain, studi yang ada menunjukkan bahwa nilai tambah yang diciptakan melalui kegiatan agribisnis (agroindustri dan jasa-jasa yang terkait) sudah berada di atas kecamatan (PSP-IPB, 1995); pada tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan, bahkan, internasional. Beberapa kesenjangan atau masalah perlu dicatat dalam kaitan ini, antara lain: **pertama**, secara formal, wadah organisasi secara vertikal adalah Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang wilayah kerjanya propinsi dan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) pada tingkat nasional. Dalam prakteknya, entah dimana kesalahannya, jarak kerja antara nasional (INKUD) dan propinsi (PUSKUD), di satu pihak, dan kecamatan (KUD), di pihak lain, cenderung agak jauh. Hal itu terlihat misalnya dalam hal program pengadaan pangan secara khusus beras; INKUD dan PUSKUD hampir tidak berperan sama sekali.

Yang **kedua** adalah bahwa, secara vertikal dan utuh, selama ini organisasi ini tidak menangani suatu agribisnis andalan padahal dengan pengalaman menangani tataniaga cengkeh, terlihat bahwa adanya komoditas andalan ini bisa menjalin kerjasama yang lebih utuh sejak dari tingkat kecamatan hingga nasional; bahkan kalau perlu sampai ke tingkat pasar internasional (eksport). Yang **ketiga**, dengan kemampuan manajemen dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki (*endowment*), yakni terutama manusia atau tenaga kerja keluarga serta modal, maka skala usaha yang bisa dilakukan oleh usaha kecil terletak dalam suatu rentang tertentu. Ada batas skala minimal dan maksimal. Secara ekonomis efisiensi bisa ditingkatkan dengan skala usaha yang lebih luas (*economies of scale*) melalui pengorganisasian seperti koperasi (Nerlove, 1995) atau melalui program kemitraan.

Yang **keempat**, dan mungkin yang paling penting, nilai tambah yang terbesar yang diciptakan melalui kegiatan agribisnis dan agroindustri justru pada sektor hilir (dan hulu) atau *off-farm agribusiness*. Secara



administratif, *off-farm agribusiness* ini sebagian besar sudah berada di atas desa atau di luar batas kecamatan. KUD sebagai koperasi primer, yang selama ini satu-satunya wadah kegiatan sosial-ekonomi warga desa, jelas tidak akan mampu meraih secara nyata kegiatan *off-farm agribusiness* tersebut. Seharusnya ini menjadi ajang kerja koperasi sekunder atau koperasi atas desa.

Dengan beberapa alasan tersebut sebenarnya sudah cukup jelas pentingnya integrasi vertikal dan diversifikasi usaha agribisnis kecil melalui pengembangan koperasi pada tingkat sekunder. Dengan begitu, petani gurem/rumahtangga (yang mendominasi usaha kecil) yang dihimpun kekuatannya melalui pengembangan usaha agribisnis kecil bisa meraih sebagian dari nilai tambah yang diciptakan melalui pengembangan agribisnis/agroindustri. Organisasi INKUD, PUSKUD sampai KUD perlu disempurnakan lagi untuk menghapus berbagai kesenjangan kerja dan bisnis.

## **6.2. Strategi/Kebijaksanaan Pendukung**

Strategi pokok di muka memerlukan beberapa kebijakan lain untuk menciptakan iklim yang lebih mendukung serta agar usaha agribisnis berskala kecil dan koperasi sekunder lebih mampu mengatasi berbagai hambatan dan kendala. Beberapa diantara kebijakan tersebut yang perlu mendapat pertimbangan dan dilaksanakan adalah:

- ❑ **Rasionalisasi layanan pendukung**. Pengembangan layanan agribisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan agribisnis secara keseluruhan. Rasionalisasi lembaga-lembaga penunjang kegiatan agribisnis harus dilakukan sehubungan dengan peningkatan efisiensi dan daya saing lembaga-lembaga tersebut, baik di dalam negeri maupun dalam pasar internasional, serta dengan mengembangkan kepercayaan dunia usaha terhadap kemampuan dan kehandalan lembaga-lembaga pemberi jasa tersebut dalam memberi-

kan tunjangan terhadap kegiatan yang dilakukan. Secara khusus, lembaga penunjang yang perlu mendapat perhatian khusus adalah lembaga pemasaran, lembaga keuangan (*financial institution*) khususnya dipedesaan, dan lembaga penelitian dan pendidikan, khususnya penyuluhan.

❑ **Kebijakan dan Program Terpadu.** Kebijakan-kebijakan di atas perlu dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program agribisnis terpadu, yang mencakup beberapa bentuk kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan pengembangan produksi dan produktivitas di tingkat perusahaan (*firm level policy*). Kedua, kebijaksanaan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis. Ketiga, kebijaksanaan di tingkat sistem agribisnis yang mengatur keterkaitan antara beberapa sektor. Keempat, kebijaksanaan ekonomi makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap agribisnis. Sebagai langkah awal, hal tersebut dapat diwujudkan dengan:

- ❑ mengembangkan sistem komunikasi yang dapat mengkoordinasikan pelaku-pelaku kegiatan agribisnis dengan penentu-penentu kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi sistem agribisnis secara keseluruhan maupun masing-masing subsistem agribisnis;
- ❑ membentuk, mengembangkan, dan menguatkan asosiasi pengusaha yang terlibat dalam kegiatan agribisnis pada berbagai jenjang (lokal, regional, nasional), tidak hanya asosiasi yang dapat bergerak antar-subsistem, yaitu asosiasi dengan integrasi vertikal; dan,
- ❑ mengembangkan kegiatan masing-masing subsistem agribisnis yang terutama ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan manajemen melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi.

❑ **Pengembangan Organisasi.** Pengembangan agribisnis dan agroindustri berskala kecil membutuhkan lingkungan usaha yang mendukung.

Upaya ini adalah tugas pemerintah. Fungsi sebagai "pengarah" dan "pemberi layanan" ini perlu lebih dominan. Dalam hal ini, petani serta usaha agribisnis dan agroindustri berskala kecil membutuhkan organisasi yang dapat memperjuangkan nasib mereka dalam konteks pemikiran dan konsep agribisnis. Organisasi petani tersebut perlu dibangun dalam dimensi integrasi vertikal sistem agribisnis serta mampu memberikan layanan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pelaku usaha agribisnis dalam hal manajemen dan kewirausahaan, modal, dan teknologi, melalui penciptaan mekanisme hubungan antara pelaku (dan calon pelaku) usaha agribisnis dengan berbagai kelembagaan penunjang lain. Organisasi seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), dan lain-lain yang sudah dan masih akan terbentuk perlu mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam fungsi-fungsi tersebut serta menggalang kekuatan untuk membantu pengembangan agribisnis dan agroindustri berskala kecil dan koperasi. Secara khusus, dukungan kelembagaan dalam bidang informasi, penelitian, dan pendidikan sangat diperlukan pula. Untuk hal yang terakhir ini organisasi petani dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.

## **VII. CATATAN PENUTUP**

Pengembangan agroindustri dan agribisnis di Indonesia merupakan tuntutan perkembangan yang logis dan harus dilanjutkan sebagai wujud kesinambungan, penganeka-ragaman, dan pendalaman pembangunan pertanian yang selama ini telah dilaksanakan dengan hasil yang mengesankan. Bahkan di negara-negara industri yang sudah memasuki tahap ekonomi informasi sekalipun, seperti negara-negara Masyarakat Eropah, Amerika Serikat, dan lain-lain, peranan dan sumbangan agribisnis dan agroindustri secara absolut masih sangat besar. Jasa-jasa bisnis seperti periklanan juga besar sekali kaitannya dengan agribisnis. Oleh sebab itu, pengembangan agribisnis dan agroindustri

akan tetap terkait walaupun setinggi apa tingkat kemajuan sesuatu negara. Secara khusus untuk Indonesia, paling tidak dalam 25 tahun mendatang (PJP-II), pola dan cara pengembangan perlu disesuaikan.

Dalam masa tersebut, pengembangan agribisnis dan agroindustri sangat layak menjadi salah satu andalan utama sebab walau bagaimana kita masih sulit melepaskan ketergantungan pembangunan nasional dari sektor pertanian (dan pedesaan). Dalam hal ini, sangat tergantung pada kita sendiri apakah sektor pertanian (dan pedesaan) dilihat sebagai sumber pertumbuhan atau sebagai beban pembangunan. Dalam hal ini perlu ditegaskan kembali berbagai keunggulan pengembangan agribisnis dan agroindustri yakni:

- Dengan mengandalkan pengembangan agribisnis dan agroindustri dengan ujungtombak (strategi pokok) pengembangan agribisnis berskala kecil dan peningkatan kemampuan koperasi (terutama pada koperasi sekunder) sebagai wadah organisasi dan bisnis petani dan usaha agribisnis kecil maka kita melihat potensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam setidaknya 25 tahun mendatang. Dalam situasi pasar yang lebih kompetitif, kebocoran ekonomi (*economic loss*) bisa ditekan secara lebih nyata.
- Strategi pengembangan agribisnis dan agroindustri tersebut juga lebih menjamin perluasan kesempatan kerja bagi sebagian besar angkatan kerja tidak terlatih yang terus bertambah. Selama ini, sebagian besar mereka ditampung di sektor pertanian (dan pedesaan) dengan perolehan nilai tambah yang sangat minimal sehingga sektor ini menjadi kantong kemiskinan terbesar. Dengan strategi ini diharapkan bahwa kesenjangan ini dapat dihilangkan. Dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah yang dapat diraih berarti juga peningkatan daya beli sebagian besar masyarakat.
- Pengembangan agribisnis dan agroindustri berskala kecil sangat mudah diarahkan untuk bersahabat dengan lingkungan. Di samping mereka tidak perlu tergantung terlalu banyak pada sumberdaya alam yang ekstraktif, juga

limbah usaha mereka bisa ditekan dan dikendalikan pada tingkat yang minimal.

Satu hal lagi yang sangat penting ialah walau bagaimana negara kita akan memiliki keunggulan atau kekhasan lokasi (*location specific*). Sebagai daerah tropis, tanaman dan hewan yang diusahakan akan memiliki kekhasan; yang membedakannya dari produk-produk pertanian sub-tropis dan daerah dingin. Kekhasan ini perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam suasana perekonomian dunia yang semakin bebas (bukan liberalisme) dan penuh persaingan sesuai dengan cita-cita dan aspirasi GATT/WTO atau APEC.

Untuk itu kita membutuhkan suatu komitmen untuk membangun suatu perekonomian yang industrinya berbasis pertanian atau **AGRO-INDUSTRIALIZED ECONOMY (AIE)** setidaknya dalam 25 tahun mendatang. Juga berdasarkan pengalaman sejumlah negara lain, tidak perlu diragukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi antara 8 sampai 10 persen per tahun tidak akan bisa dicapai yakni: sepanjang komitmen kita terhadap membangun suatu **NEGARA AGRO-INDUSTRI BARU (NEWLY AGRO-INDUSTRIALIZED COUNTRY - NAIC)** benar-benar diterima dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Sama dengan pengalaman negara-negara seperti Malaysia dan Thailand serta negara-negara yang tergolong *the East Asian Miracle* lainnya (Jepang, Korea Selatan dan Taiwan), dukungan pemerintah secara tepat sangat diperlukan.

## Reference:

- CRAWFORD, R. 1991. In the Era of Human Capital; The Emergence of Talent, Intelligence, and Knowledge as the Worldwide Economic Force and What It Means to Managers and Investors. U.S.A.: Harper.
- DASRIL, A.S.N. 1993. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Produksi Sektor Pertanian Dalam Industrialisasi di Indonesia, 1971-1990.
- JAMES, W.E., S. NAYA, G.M. MEYER. 1987. Asian Development Economic Success and Policy Lesson. International Center.
- JAZAIRY, I., M. ALAMGIR, T. PANUCCIO. 1992. The State of Rural Poverty, An Inquiry into Its Causes and Consequences. London, UK: IT Publications for the International Fund for Agricultural Development.
- MOSHER, A.T. 1976. Thinking About Rural Development. N.Y.: A.D.C.
- , 1969. Creating A Progressive Rural Structure To Serve a Modern Agriculture. N.Y.: A.D.C.
- NERLOVE, M. 1994. Reflection on the Economic Organization of Agriculture: Traditional, Modern, and Transitional. Staff Working Paper, Departemen of Agricultural and Resource Economics, Univ. of Maryland, U.S.A.
- PSP-IPB. 1995. Penyusunan Pola Pengembangan Kegiatan Agribisnis dan Agroindustri Melalui KUD. Kerjasama Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan Dept. Koperasi dan PPK dengan Pusat Studi Pembangunan (PSP-IPB), Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
- SARAGIH, B AND S.M.H. TAMPUBOLON. 1989. Agricultural Development in Four Repelitas; Review of Policy Trends and Performance. In, N. Mihira (ed), Indonesia: Two Decades of Economic Development. Tokyo: Institute of Developing Economies.
- SIMATUPANG, P. 1995. Industrialisasi Pertanian Sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian Dalam Era Globalisasi. Orasi Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, September.
- WHITE, B. 1990. Agro-industry, Rural Industrialisation, and Rural Transformation (*Agroindustri, Industrialisasi Pedesaan dan Transformasi Pedesaan*). In, Sayogyo and M. Tambunan (Eds), *Rural Industrialisation (Industrialisasi Pedesaan)*. Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor and Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Cabang Jakarta.
- WORLD BANK. 1993. East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. New York, Toronto, U.S.A.: Oxford University.
- YOTOPOULOS, P.A. 1990. Exchange Rates and State-Led Capitalism: What can the NIC's Learn from Japan. Stanford University, U.S.A. Paper prepared for the Annual Convention of the East Asian Economic Association, Bandung, Indonesia, Agust 1990.